

INTISARI

Penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam mengakomodasi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan karena penyandang disabilitas kerap tidak dapat mengakses pekerjaan yang disebabkan oleh kedisabilitasannya yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Padahal penyandang disabilitas berhak atas hak dalam pekerjaan yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Ditambah dengan telah adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang juga telah mengatur beberapa bidang termasuk didalamnya ialah bidang pekerjaan sebagai bidang pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan langsung melakukan observasi dan wawancara di lapangan terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah terkait fungsi pengaturan masih lemah diakibatkan oleh pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selama ini digunakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai dasar hukum perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih tidak jelas berada dibawah pertanggungjawaban departemen sosial atau departemen ketenagakerjaan. Kegiatan pelatihan yang diadakan oleh departemen sosial dan juga departemen ketenagakerjaan yang masih tidak mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan sosialisasi kepada penyedia lapangan pekerjaan yang tidak merata dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang masih pasif dalam menjadi pen jembatan antara penyedia lapangan pekerjaan yang merupakan wujud kegiatan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta terkait peran pemerintah dalam fungsi pelayanan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meningkatkan pengawasan terhadap regulasi yang digunakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Meningkatkan sosialisasi dan melakukan inovasi pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pun harus lebih mensosialisasikan ada Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PPHD) Kota Yogyakarta sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan pelayanan yang diberikan oleh komite secara maksimal. Dan yang terakhir ialah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta lebih aktif untuk menghubungi penyedia lapangan pekerjaan agar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bisa benar-benar menjadi penghubung antara penyedia lapangan pekerja dan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penyandang Disabilitas, Pekerjaan

ABSTRACT

This study focuses on the role of government in accommodating persons with disabilities in accessing employment for persons with disabilities are often unable to access jobs due to disabilities owned by persons with disabilities themselves. In fact, persons with disabilities are entitled to the same job with the general public. Coupled with have their regulations Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas which also have set several fields including the field is the field of work as a fulfillment of the rights of persons with disabilities.

People with disabilities tends to be marginalized and excluded from the society. Beside social status, this groups tends to be marginalized from their own rights. According to the human rights and law, disabled people have the same rights as any other citizens to get access everthing including job. Social agency, labour and trasmigration of Yogyakarta use local government regulation (Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas) to protect and fulfill disabled people rights. But the fact is, people with disabilities in Yogyakarta experience difficulty to get a job.

Researcher uses qualitative research methods. The data were collected from primary and secondary data. Primary data were collected by observation and interview with informants. Secondary data were collected from reports about how disabled peoples having difficulties to get a proper job.

The results show that government (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta) weren't ready. Implementation of local government regulation (Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas) and trainings to protect and fulfill disabled people rights weren't good enough to help and facilitate this groups (People with disabilities) to get access for a job. Pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PPHD) of Yogyakarta aims to protect and fulfill disabled people rights by helping them to get proper job, but it doesn't work well either.

Researcher recommend Social agency, labour and trasmigration of Yogyakarta to increase the level of supervision, socialization, training inovation to help and facilitate this groups (People with disabilities) to get a proper job, protect them, fulfill their rights.

Keywords : Role of Government, People with Disabilities, Employment